

## **BAB V**

### **PENUTUP**

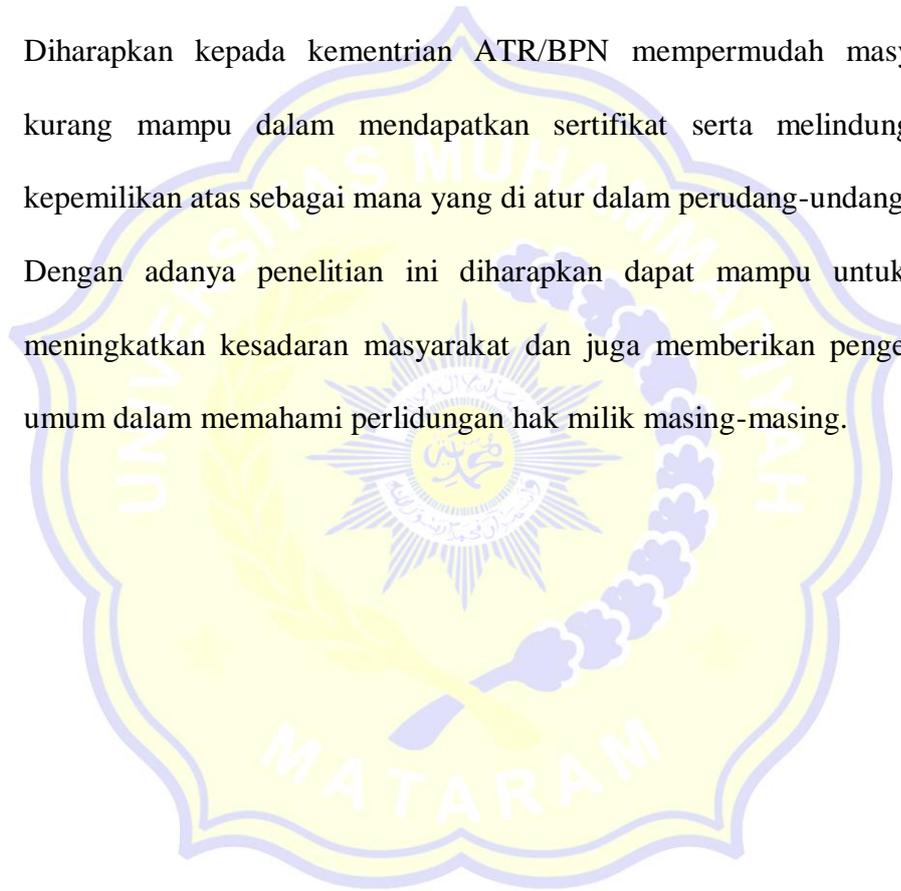
#### **A. Kesimpulan**

1. Melalui pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) Kementerian ATR/BPN menargetkan 126 juta bidang tanah bersertifikat diseluruh wilayah Indonesia tahun 2025. Program ini merupakan program pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pelayanan masyarakat dan pemerintah Kota Mataram mendapatkan target 5.000 sertifikat dari target tersebut akhirnya terlaksana 2.000 sertifikat dan sudah dibagikan kepada pemilik tanah di 2 Kecamatan. Program ini diprioritaskan untuk warga kurang mampu dimana mereka memiliki hak hukum untuk mendapatkan sertifikat. Secara konsitutional perlindungan hak kepemilikan termaksud didalamnya adalah hak kepelikan tanah. Konsekuensinya Negara akan bertanggung jawab, melindungi, menghormati dan memfasilitasi masyarakat untuk mempertahankan hak atas kepemilikan oleh setiap orang tanpa diskriminasi.
2. Perlindungan masyarakat telah dilakukan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat lebih khususnya dipemerintah kelurahan. Selain pemerintah kelurahan, pemerintah melalui peraturan perundang-undang telah berusaha membantu warga masyarakat untuk memperoleh perlindungan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan serta memberikan jaminan hukum terhadap warga Negara maka pemerintah menekankan pengurusan sertifikat atas tanah di kantor BPN atau melalui

pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Di ketahui mekanisme pendaftaran tanah dilakukan melalui kebijakan kepada Desa/Lurah, setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dengan melaporkan kepada pemerintah Desa. Mekanisme pendaftaran tanah adalah dengan di adakan registrasi kepemilikan hak atas tanah bagi setiap masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada kementerian ATR/BPN mempermudah masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan sertifikat serta melindungi hak kepemilikan atas sebagai mana yang di atur dalam perundang-undang.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga memberikan pengetahuan umum dalam memahami perlindungan hak milik masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2005.
- Arif Budimanta, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito. 2008. *Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Indonesia Center for Sustainable Development.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2007. *Reforma Agraria, Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN-RI. Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. Jakarta : Dasawarsa Bhumi Bhakti Adhiguna.
- Bahari, Syaiful. 2012. *Petani dalam perspektif moral ekonomi dan politik Ekonomi dalam Menuju Keadilan Agraria*. Diterbitkan oleh Akatiga bekerja sama dengan IPB.
- Beodi Harsono, (2006), *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta Djambatan.
- Budi Harsono. 1994. *Hukum Agraria ; Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- De Soto, H, 2006. *The Mistery of Capital*, Edisi Bahasa Indonesia. Penerbit Qalam. Yogyakarta.
- Dianto Bachriadi, 2007. *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*,
- Fauzi, Noer dan Ghimire, Khrisna. 2008. *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria*. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- G. Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik : konsep, teori dan aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 14 No.3. Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, Boedi, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

- Hermawan Sauni (ed) 1998. *Perlindungan Hukum Agraria, Beberapa Pemikiran dan Gagasan*. Medan : USU.
- Jawahir Thontowi. “Reformasi dan Kompilasi Peraturan Hukum Kerukunan Antar Umat Beragama”. Didalam Hanafi Sofyan. 1995. Indonesia dalam Transisi : Canberra : Halmahera Foundation.
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta.
- Prijono, O.S., Pranarka, A. M. W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Priyono, OS dan Pranarko, A. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Impelementasi*. CSIS. Jakarta.
- Rudito, B dan Budimantam A. 2007. *Metode dan Tehnik Pengelolaan Community Perkoperasian*. ICSD. Jakarta.
- Shohibuddin dan Salim, Muhammad Nazir. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*. Sekolah Tinggi Pertanian Negara Press, Yogyakarta, 2012.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pusaka Utama. Jakarta.
- Utami, Putri Ayu Rezki. 2013. *Kajian Hukum Pelaksanaan Program Pebaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Widodo, 2001, *Good Governance Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendikia.
- Wiradi, G. 2001. *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Laper Pusaka Utama, Yogyakarta.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputido.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2043).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997.





**IPEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**KECAMATAN SEKARBELA**  
**KELURAHAN KEKALIK JAYA**

Jln.Swadaya No. 65 Kekalik Kode Pos 83115 Telp. ( 0370 ) 622702

Kekalik, 12 November 2019

Nomer : 26<sup>2</sup>/KJ/XI/2019

Lamp. : -

Prihal : **Ijin Penelitian**

K e p a d a

Yth. Bapak Kepala Lingkungan

Kekalik Timur

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor : 149/II.3.AU/5/F/VII/2019 Tanggal 27 Juli 2019, maka dengan ini kami mohon Kepada Bapak Kepala Lingkungan Kekalik Timur agar dapat memberika Ijin Penelitian di Wilayah Bapak demi memperlancar penyusunan Skripsi yang bersangkutan adapun Nama Peneliti A.N ADHI NINGTIAS NUGRAHA, Judul Penelitian “ Perspektif Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Pasca Sertifikat Hak Tanah “

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**LURAH,**

Kasi Perekonomian &  
Sarana dan prasarana



**HERMAN, S.Adm**

NIP. 196412312006041235



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram Email : fakum.umm@gmail.co.id

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR/UJIAN SKRIPSI

Nama : ADHI NINGTAS MUGRAHA  
NIM : 6741100040  
Judul Skripsi : PERSPEKTIF Yuridis Pemberdayaan Masyarakat  
Pasca Sertifikasi: Hat Atas Tanah

No	NIM	Nama	Tanda Tangan
1	616110147	M. RIZKI NURBIANTARA	
2	61311A0058	Yazir M. Imanul	
3	60311A0037	Muhammad Furgan	
4	61911A0090	IMAM CAHYADI	
5		Lula Loharunisa	
6	61511A0009	ANASRI	
7		DIDIN SETYADIN	
8	216020019	M. RISWAN DEMAWAN	
9		Muhammad Zulfikar	
10		Didi M. Solihin	
11	616110191	MURPAZILA	
12	616110183	ANITA BIMA YANATI	
13			
14			
15			

Mataram, Januari 2020  
Mengetahui,  
An. Kaprodi

Ady Supryadi, S.H., M.H.  
NIDN. 0803128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummi@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA

: Adhi Ningfiar Nugraha

NIM

: 61911A0007

PROG. STUDI

: .....

IPK

: .....

DOSEN PS I : Nasri, S.H., M.H.

DOSEN PS II : Hamdi, S.H., L. KM

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	26/8/2019	Revisi		
	27/8/2019	<del>Revisi</del> ACC proposal		
	28/8/2019	Revisi		
	29/8/2019	ACC proposal		
	4/1/2020	Revisi		
	5/1/2020	Revisi		
	6/1/2020	ACC skripsi		
	7/1/2020	Revisi		
	8/1/2020	Revisi		
	9/1/2020	ACC skripsi		

Mengetahu  
Dekan/ Ketua Prodi,

(.....)

NIDN. ....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336. Mataram. Email : fakum.urnm@gmail.co.id

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN  
UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Rabu Tangga Dua Puluh Dua Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul empat belas sampai pukul lima belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Nama Mahasiswa** : ADHI NINGTIAS NUGRAHA  
**NIM** : 61411A0007  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : PERSPEKTIF YURIDIS PEMBERBAYAAN PASCA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH

**HASIL UJIAN**

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Dr. Hilman Syarial Haq, SH.LLM	83	91 – 100	A
2.	Nasri, SH. MH.	82	84 – 90	A-
3.	Hamdi, SH.I.LLM.	82	77 – 83	B+
			71 – 76	B
	Jumlah Skor =		66 – 60	B-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =		55 – 60	C
			41 – 54	D

Mataram, 22.1.2020

Ketua Penguji,

(Dr. Hilman Syarial Haq, SH.LLM)

Anggota :

1. Nasri, SH. MH.
2. Hamdi, SH.I.LLM